

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 silam merupakan tonggak sejarah yang membuka pintu menuju Indonesia emas.¹ Secara jelas, cita-cita luhur menuju Indonesia emas telah dimuat dalam 4 pilar bangsa Indonesia, yakni: Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang secara intens memperjuangkan agar kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia.² Atas dasar landasan tersebut, Indonesia terdorong untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang sejahtera sebagai negara yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

Dengan semangat yang sama, pada tahun 2016 Presiden Jokowi mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk merumuskan visi Indonesia Emas 2045. Visi ambisius ini bertumpu pada proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2020 yang memperkirakan bonus demografi dengan 64% penduduk usia produktif dari total 297 juta jiwa pada 2030-2040,³ serta prediksi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) bahwa ekonomi Indonesia akan mencapai USD 8,89 triliun pada 2045.⁴ Selain itu, visi ini juga menjadi bagian dari upaya menyongsong 100 tahun kemerdekaan, sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi pada Mei 2019 bahwa setelah lebih dari 70 tahun merdeka, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan, baik dalam kesejahteraan rakyat maupun peran global. Sehingga untuk menyambut 100 tahun kemerdekaan, Presiden Jokowi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

¹ Aminah Nurmillah, "Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatarmogana", dalam *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045>, diakses pada 28 April 2024.

² *Ibid.*

³ Badan Pusat Statistik, *Analisis Profil Penduduk Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 18.

⁴ Aminah Nurmillah, *loc. cit.*

untuk merumuskan Visi Indonesia Emas 2045.⁵ Perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 merupakan bagian integral dari tujuan perjuangan kemerdekaan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Keduanya menjadi landasan ideologis dan konstitusional yang menghendaki Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan.

Berangkat dari landasan dasar menuju Indonesia Emas 2045, penulis memandang bahwa penting untuk memastikan perjalanan tersebut tidak menambah beban baru bagi negara, khususnya bagi rakyat Indonesia. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus bebas dari jebakan kepentingan elit politik, agar cita-cita tersebut benar-benar dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan cita-cita luhur bangsa, salah satu persoalan krusial yang perlu mendapat perhatian serius adalah kepentingan terselubung kaum elit. Dalam hal ini, kebijakan publik yang dicanangkan oleh pemerintah harus terbebas dari berbagai bentuk kepentingan tersembunyi yang cenderung lebih menguntungkan kalangan elit dan para investor dibandingkan kepentingan rakyat.

Berkaitan dengan persoalan kepentingan kaum elit, contoh kasus yang disoroti penulis adalah tersenderanya bangsa Indonesia terhadap investasi asing seperti PT. Freeport Indonesia (salah satu perusahaan emas raksasa Amerika Serikat) pada masa rezim Orde Baru. Pada masa tersebut, pemerintahan Presiden Soeharto mengadopsi ekonomi liberal yang bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila yang termuat dalam UUD 1945.⁶ Selain itu, pengesahan UU penanaman modal asing tahun 1967 dan UU pertambangan 1967, juga menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti eksploitasi alam oleh berbagai elit terselubung dan para investor. UU tersebut merupakan produk dari paket kebijakan yang memuluskan investasi Amerika Serikat yang awalnya disepakati bersama pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1967

⁵ Kementerian PPN/Bappenas, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), hlm. v.

⁶ Siti Maimunah (ed.), *Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa Menjajah Indonesia* (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2006), hlm. 11.

dalam bentuk konsesi, tetapi kemudian ada perubahan yang sangat menguntungkan PT. Freepot dan mengorbankan masyarakat Pegunungan Tengah, Papua.⁷

Berangkat dari persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah kerap kali tidak berpihak pada rakyat. Ketidakberpihakan ini melahirkan ketimpangan ekonomi yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan sosial. Selain itu, terdapat juga pengaruh kepentingan terselubung yang secara diam-diam mempengaruhi proses politik melalui praktik-praktik tersembunyi. Persoalan ini juga tidak terlepas dari dinamika praktik politik Indonesia dewasa ini. Kepentingan bisnis atau finansial sering kali ikut campur dalam pengambilan keputusan politik, yang kemudian tercermin dari kuatnya pengaruh perusahaan besar dalam proses penyusunan kebijakan dan maraknya praktik korupsi yang melibatkan politisi serta pengusaha.

Kondisi ini mengarah pada ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan merusak nilai-nilai demokrasi, karena kebijakan yang dihasilkan cenderung mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan umum. Dominasi kepentingan tersembunyi juga menimbulkan persoalan serius seperti korupsi dan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok perekonomian. Keterlibatan pemilik modal dalam mendanai kampanye, kegiatan lobi, hingga tekanan terhadap kebijakan pemerintah telah mengalihkan organisasi kebijakan publik dari upaya menyejahterakan rakyat menjadi alat untuk memperkaya segelintir pihak.

Dampaknya, kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan sosial dan meningkatkan potensi ketidakstabilan politik. Selain itu, kepentingan elit politik juga sangat memengaruhi dinamika serta proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, dalam sistem politik demokrasi, kekuasaan seharusnya bersumber dari kedaulatan rakyat dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan elit semata.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

Setiap keputusan politik harus diambil secara bijak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara menyeluruh. Diperlukan ketegasan dalam membatasi intervensi dari kepentingan elit atau pemilik modal, baik dari dalam maupun luar negeri, yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Mengingat besarnya pengaruh dan dampak dari kepentingan elit terselubung, maka dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat. Hal ini sangat penting agar Indonesia tidak kembali terjebak dalam praktik penyimpangan kekuasaan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, yang ditandai oleh otoritas dan dominasi segelintir elit.

Sebagai solusinya, penulis mengajukan pemikiran politik ekonomi Tan Malaka mengenai *Merdeka 100%* sebagai basis etis dan pedoman strategis dalam proses pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Konsep ini juga menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Selain itu, pemikiran Tan Malaka yang berkaitan dengan *Logika Mistika* juga merupakan upaya untuk menjawab persoalan keterbelakangan Indonesia menjadi negara maju.

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka disebut sebagai tokoh pejuang yang misterius dan tokoh progresif golongan kiri.⁸ Selain itu, secara luas, Tan Malaka juga dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia, sebagaimana kata Mohamad Yamin.⁹ Nasionalisme Tan Malaka lahir dari kecintaannya yang mendalam terhadap bangsa Indonesia. Semangat tersebut tidak hanya mendorong Tan Malaka dalam perlawanan terhadap para penjajah, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan pengabdian diri sebagai seorang pengajar serta sebagai seorang sosialis nasionalis. Bagi Tan Malaka, nasionalisme adalah wujud nyata dari kemerdekaan Indonesia yang didasarkan atas sosialisme dan bersatunya kekuatan

⁸ Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka: Kajian Terhadap Perjuangan Sang Kiri Nasionalis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 6.

⁹ Wibawanto, "Melacak Materialisme Dialektis Tan Malaka dalam Sejarah Ilmu Sosial Indonesia" *Jurnal Pemikiran sosiologi*, 6:2 (Yogyakarta: Agustus, 2019), hlm. 169.

revolusioner.¹⁰ Semangat nasionalisme dan pemikiran revolusioner Tan Malaka juga terlihat dalam karya-karyanya yang diterbitkan sebelum kemerdekaan, misalnya *Naar de Republiek Indonesia*. Buku tersebut memberikan pengaruh besar terhadap tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta.¹¹ Selain itu, keterlibatan Tan Malaka dalam politik praktis setelah kepulangannya dari Belanda pada Juni 1921¹² turut memberikan kontribusi penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tampak dari sikap progresifnya yang menekankan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan melalui revolusi, yang kemudian diwujudkan dalam pembentukan Persatuan Perjuangan, setelah ia memperoleh testimoni dari Presiden Soekarno. Dalam Persatuan Perjuangan Tan Malaka menghendaki agar kemerdekaan yang diraih mesti berjiwa *Merdeka 100%* yang secara intens menekankan kemandirian politik ekonomi dari praktik kepentingan para elit dan kaum kapitalis. Ia menghendaki agar kemerdekaan yang diperjuangkan harus benar-benar dirasakan secara nyata oleh rakyat Indonesia. Perjuangannya tersebut juga kembali digaungkan setelah ia dibebaskan dari penjara ke penjara hingga menjelang hari kematiannya. Selain itu, dalam perjuangan, Tan Malaka juga secara khusus menekankan pengembangan sistem ekonomi berbasis pada kekeluargaan dan demokrasi. Ia menolak kapitalisme dan mengusulkan sistem ekonomi yang berbasis pada azas kekeluargaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.¹³ Berkat sumbangsuhnya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan dan pemberian diri secara total sebagai seorang nasionalis sejati, Tan Malaka ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno berdasarkan Keputusan Presiden RI No.53, yang ditandatangani pada 28 Maret 1963.¹⁴

Dewasa ini, Tan Malaka dikenal sebagai salah satu tokoh sosialis nasionalis Indonesia yang kembali menjadi sorotan, terutama dalam kaitannya dengan wacana

¹⁰ Safrizal Rambe, *op. cit.* hlm. 7.

¹¹ Lukman Hakiem, *Dari Punggung Sejarah Bangsa: Belajar Dari Tokoh dan Peristiwa* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 8-9.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

¹³ Bigraf Triangga, "Pemikiran Tan Malaka" dalam *Binus University Business School*, <https://binus.ac.id/malang/ebc/pemikiran-tan-malaka/>, diakses pada 28 April 2024.

¹⁴ Lukman Hakiem, *op. cit.*, hlm. 20.

"Indonesia Emas 2045". Pemikiran-pemikirannya kini kembali diulas dan dikaji oleh berbagai kalangan, salah satunya melalui platform *Malaka Project* yang didirikan oleh Cania Citta, Ferry Irwandi, dan sejumlah tokoh milenial lainnya. Dalam karyanya, ia kerap melontarkan kritik terhadap kapitalisme dan kaum elite negara, seperti yang tercermin dalam gagasannya mengenai "Merdeka 100%".

Selain itu, dalam bukunya *Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika)*, Tan Malaka menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui penguasaan pengetahuan dan penalaran logis. Ia mengkritik cara berpikir masyarakat yang menurutnya masih terjebak dalam "logika mistika", yaitu cara berpikir irasional yang dianggap menghambat kemajuan bangsa menuju negara maju.¹⁵ Berdasarkan pemikiran politik ekonomi Tan Malaka yang termuat dalam perjuangannya *Merdeka 100%* dan *Logika Mistika*, dapat disimpulkan bahwa ia menolak kepentingan terselubung elit politik dan sistem kapitalisme karena dianggap menciptakan ketimpangan dan eksploitasi, serta mengusulkan sistem ekonomi berbasis kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan pentingnya kemerdekaan politik yang hanya dapat dicapai melalui kemandirian ekonomi, yaitu dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri tanpa ketergantungan pada modal asing. Tan Malaka juga mendorong pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan rakyat, serta pembangunan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan dalam kerangka kekeluargaan dan demokrasi. Seluruh pemikirannya berorientasi pada terciptanya masyarakat adil dan makmur yang berdiri di atas kedaulatan nasional dan solidaritas sosial.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis memproposalkan skripsi di bawah judul **PEMIKIRAN POLITIK EKONOMI TAN MALAKA SEBAGAI LANDASAN INSPIRASI DALAM PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045**. Tulisan ini, hendak mendalami strategi pemerintah dalam proses pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan pemikiran politik ekonomi Tan

¹⁵ Safrizal Rambe, *op. cit.*, hlm. 294-298.

Malaka sebagai landasan yang digunakan penulis. Dalam tulisan ini, penulis menghendaki agar persiapan dan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah mesti dijiwai semangat nasionalisme yang berdaulat serta benar-benar menjawab kepentingan rakyat Indonesia (pro-rakyat). Maka, penulis secara intens membahas isu kepentingan elit terselubung sebagai salah satu dilema dan isu yang sensitif terhadap pembangunan yang berkerakyatan sebagaimana yang ditegaskan Tan Malaka dalam sintesis pemikiran politik ekonominya.

1.2 Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan, tercatat bahwa terdapat tiga karya ilmiah mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero yang telah secara khusus menelaah pemikiran Tan Malaka.

Skripsi pertama ditulis oleh Lazarus Pice pada tahun 2002 dengan judul “Indonesia yang Sosialis: Konsep Negara menurut Tan Malaka”. Dalam penelitian ini, Pice menyoroti konsep negara sosialis yang dirumuskan oleh Tan Malaka, yang berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial, serta penguatan budaya nasional.¹⁶

Skripsi kedua disusun oleh Stefanus Dampur pada tahun 2006 dengan judul “Perubahan Paradigma Berpikir Mistis-Pasif menuju Rasional Aktif: Telaah atas Pemikiran Filsafat Sosial Politik Tan Malaka dalam Madilog”. Dampur mengkaji secara mendalam karya Tan Malaka berjudul *Madilog* (Materialisme, Dialektika, dan Logika), yang merefleksikan upaya Tan Malaka dalam mentransformasikan pola pikir masyarakat Indonesia. Dalam pandangan Tan Malaka, pergeseran dari pola pikir mistis dan pasif menuju pendekatan rasional dan aktif merupakan syarat utama bagi keberhasilan perjuangan kemerdekaan dan pembangunan politik yang progresif.¹⁷

Skripsi ketiga ditulis oleh Yohanes Efraim More Meto pada tahun 2008 dengan judul “Sosialisme Kerakyatan: Memperkenalkan Idealisme Politik Tan

¹⁶ Lazarus Pice, “Indonesia yang Sosialis: Konsep Negara menurut Tan Malaka” (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2002).

¹⁷ Stefanus Dampur, “Perubahan Paradigma Berpikir Mistis-Pasif menuju Rasional Aktif: Telaah atas Pemikiran Filsafat Sosial Politik Tan Malaka dalam Madilog” (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2006).

Malaka”. Penelitian ini menyoroti idealisme politik Tan Malaka yang berakar pada semangat sosialisme kerakyatan, yaitu suatu bentuk sosialisme yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan pembebasan kolektif dari penindasan struktural.¹⁸

Berbeda dengan ketiga skripsi terdahulu, tulisan ini hendak mengkaji pemikiran politik ekonomi Tan Malaka mengenai *Merdeka 100%* sebagai basis etis dan pedoman strategis dalam proses pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Konsep ini juga menjadi landasan inspirasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Selain itu, tulisan ini juga membahas kritik Tan Malaka terhadap *Logika Mistika*, yang menurutnya merupakan salah satu sumber keterbelakangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. Kritik ini menekankan pentingnya pengetahuan dan rasionalitas dalam membangun SDA Indonesia yang unggul.

Menurut penulis, pencapaian Indonesia Emas 2045 memerlukan kesiapan serta kemampuan mengantisipasi berbagai dilema yang berpotensi menghambat pembangunan. Cita-cita besar tersebut hanya dapat terwujud apabila kemerdekaan benar-benar dimiliki dan dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan sekadar secara formal, tetapi juga secara substansial. Dalam kerangka inilah pemikiran politik ekonomi Tan Malaka, khususnya konsep *Merdeka 100%* yang dijadikan sebagai landasan etis untuk mengkritik praktik-praktik terselubung kaum elit politik yang dinilai merugikan rakyat dan menjauhkan arah pembangunan dari kepentingan bersama. Bagi penulis, mempelajari sejarah merupakan langkah penting dalam menatap masa depan, agar bangsa ini tidak terjerumus ke dalam jebakan kepentingan segelintir orang dan tidak kembali pada bentuk-bentuk perbudakan terselubung, meskipun secara hukum Indonesia telah merdeka. Sebagai tawaran solusi, pemikiran politik-ekonomi Tan Malaka yang berkaitan dengan *Merdeka 100%* dan kritiknya yang berkaitan dengan *Logika Mistika* diajukan sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan

¹⁸ Yohanes Efraim More Meto “Sosialisme Kerakyatan: Memperkenalkan Idealisme Politik Tan Malaka” (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2008).

Indonesia Emas dengan penekanan pada SDM yang unggul dan kemerdekaan yang berpihak pada rakyat.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah utama yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pemikiran politik ekonomi Tan Malaka dapat digunakan sebagai landasan inspirasi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045? Sejauh mana kepentingan elit terselubung memengaruhi arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045? Bagaimana pemikiran Tan Malaka mengenai “Merdeka 100%” dan “Logika Mistika” dijadikan sebagai landasan untuk melawan praktik-praktik kepentingan elit terselubung (kapitalisme kroni) dan memperjuangkan kedaulatan bagi rakyat Indonesia?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ini bertujuan untuk menggali pemikiran dan perjuangan Tan Malaka sebagai tokoh revolusioner yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. Penulis hendak membuka kembali ruang diskusi kritis mengenai peran pemikiran kiri dalam pembentukan jati diri bangsa, yang selama ini cenderung diabaikan atau disingkirkan dalam narasi sejarah bangsa. Selain itu, tulisan ini dimaksudkan untuk meninjau secara kritis konsep dan visi besar pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan menyoroti berbagai tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi. Penulis berusaha menunjukkan bagaimana visi masa depan bangsa sering kali berhadapan dengan kepentingan-kepentingan elit yang tersembunyi di balik kebijakan pembangunan, serta bagaimana warisan pemikiran Tan Malaka dapat menjadi sumber refleksi dalam menghadapi tantangan tersebut. Secara khusus, karya ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada Tan Malaka sebagai bagian dari upaya meluruskan sejarah, sekaligus memenuhi salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan karya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan deskripsi dan analisis kritis. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian kepustakaan untuk mencari referensi yang relevan dengan topik yang dibahas, serta menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulis secara mendalam menelaah sumber-sumber primer, khususnya tulisan-tulisan dari Tan Malaka dan Harry Poeze, serta memanfaatkan sumber-sumber sekunder yang membahas pemikiran Tan Malaka maupun kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 dan menyoroti kepentingan tersembunyi para elit politik serta pengaruhnya terhadap arah pembangunan menuju cita-cita tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis ini disusun secara sistematis ke dalam empat bagian utama atau empat bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang mencakup beberapa poin penting, yaitu latar belakang penulisan, perumusan masalah, metode yang digunakan, tujuan penulisan, serta sistematika penyajian isi karya tulis. Bab II memuat uraian tentang sosok Tan Malaka, karya-karya besarnya dan pemikiran yang menjadi landasan penulis dalam mengulas persoalan dalam skripsi ini, dan akhir hidup Tan Malaka. Bab III membahas peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 beserta berbagai dilema yang muncul, khususnya terkait dengan kepentingan elit politik dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Penulis kemudian akan mengulas perjuangan Tan Malaka dalam gerakan politik ekonomi *Merdeka 100%* dan *Logika mistika*, serta keterkaitannya dengan peta jalan tersebut. Bab ini merupakan bagian inti dari karya ini, karena berisi pemikiran tentang bagaimana mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berorientasi pada rakyat berdasarkan gagasan Tan Malaka tentang *Merdeka 100%* dan *Logika mistika*. Penulis menggunakan pemikiran ini untuk melawan dominasi kepentingan terselubung elit politik dan berusaha melihat arah kebijakan publik menuju Indonesia Emas 2045 yang berorientasi pada kepentingan real masyarakat. Selanjutnya, Bab IV merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.